

LAPORAN RISET PEMBINAAN

Upaya Pemerintah Kota Semarang Mewujudkan Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat melalui Paradiplomasi



Dilaksanakan Oleh :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si | 196304221989032001 |
| 2. Satwika Paramasatya , SIP, MA | 198907102018031001 |
| 3. Nadia Farabi, S.Hub.Int., MA | H.7.199010272018072001 |

Dibiayai dari Sumber Dana RKAT FISIP Undip
Tahun Anggaran 2019

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul riset : Upaya Pemerintah Kota Semarang Mewujudkan Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat melalui Paradiplomasi
2. Kategori tema : Otonomi daerah dan desentralisasi
3. Bidang ilmu : Hubungan Internasional
4. Ketua peneliti
 - a. Nama lengkap dan gelar : Dra. Rr. Hermini Susiatiningsih, M.Si.
 - b. NIP/NIDN : 196304221989032001
 - c. Jabatan fungsional/gol : Lektor/3C
 - d. Fakultas/Departemen : ISIP / Hubungan Internasional
 - e. Alamat dan no. telp. kantor : Jl. Prof. Sudarto, SH, Semarang
 - f. Alamat dan no. telp. rumah : Jl. Tlogosari 1 No. 44 A, Bulusan, Semarang
5. Anggota I
 - a. Nama lengkap dan gelar : Satwika Paramasatya, SIP., MA
 - b. NIP/NIDN : 198907102018031001
 - c. Departemen : Hubungan Internasional
6. Anggota II
 - a. Nama lengkap dan gelar : Nadia Farabi, S.Hub.Int., MA
 - b. NIP/NIDN : H.7.199010272018072001
 - c. Departemen : Hubungan Internasional
7. Lokasi riset : Kota Semarang
8. Lama riset : 8 (delapan) bulan
9. Paket luaran publikasi : Artikel jurnal nasional terakreditasi dan prosiding
10. Biaya yang diperlukan : Rp. 30.000.000
11. Sumber dana : RKAT FISIP Undip Tahun Anggaran 2019

Semarang, 11 November 2019

Mengetahui,
Pimpinan Fakultas,

Ketua Peneliti,

Dr. Hardi Warsono, MTP
NIP. 196408271990011001

Dra. Rr. Hermini Susiatingsih, M.Si
NIP. 19630422 198903 2 001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang Masalah	5
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kontribusi Penelitian	7
1.5 Luaran Penelitian	7
1.6 Tinjauan Pustaka	7
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	13
1.7.2 Teknik Analisis Data	13
BAB II PROFIL KOTA SEMARANG	14
2.1 Kondisi Umum	15
2.2 Kondisi Lingkungan	16
2.3 Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa	16
2.3.1 Venice Van Java	18
2.3.2 The Port of Java	18
2.3.3 Beauty of Asia	18
2.4 Outstadt atau Little Netherland	21
2.5 Kota Lumpia	22
2.6 Kota Jamu	22
BAB III PERAN PARADIPLOMASI DALAM MEWUJUDKAN SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT	24
3.1 Peran Pemerintah Pusat dalam Paradiplomasi	24
3.2 Alur Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Paradiplomasi	27
3.3 Pentingnya Pemerintah Pusat dalam Efektivitas Paradiplomasi	29
3.4 Lokalitas Kota Semarang sebagai Modalitas Paradiplomasi di Level Global	30

3.5 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Lokalitas dalam <i>Meetings, Incentives, Conferences, and Events</i> (MICE)	33
BAB IV	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran	39
LAMPIRAN	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kota Semarang di bawah Walikota Sukawi Sutarip mencanangkan program “Semarang Pesona Asia (SPA)”, yang antara lain bertujuan untuk memperkenalkan dan membangun citra baik kota, baik di level nasional maupun internasional, guna mendorong pembangunan ekonomi dan pariwisata lokal. Program ini memiliki tiga kegiatan pokok, yaitu kepariwisataan, forum bisnis pengusaha, serta festival atau pameran (Kementerian Sekretariat Negara, 2007).

Setelah terjadi pergantian rezim kepemimpinan, kegiatan dari program SPA yang masih dipertahankan adalah Sem’Biz (Semarang Business Forum). Acara tahunan yang kini berada di bawah koordinasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang ini memiliki tujuan khusus guna mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing Kota Semarang demi tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya, Sem’Biz tidak hanya menjadi forum promosi investasi di Kota Semarang saja, tetapi juga mengajak kawasan *hinterland* yang dikenal dengan sebutan Kedungsepur (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Perkembangan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kota Semarang mengarahkan Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa.

Pemerintah Kota Semarang juga melakukan aktivitas paradiplomasi melalui kerja sama *sister city*. Kerja sama tersebut tidak hanya terbatas dengan negara-negara di Asia Tenggara saja, namun juga Asia Timur, Eurasia, hingga Eropa bagian Timur. Ada sedikitnya delapan kerja sama *sister city* yang masih aktif hingga saat ini, yakni dengan Brisbane, Australia; Beihai, Tiongkok; Griffith University, Australia; Split, Korasia; Fuzhou, Tiongkok; Nanjing, Tiongkok; Dewan Perairan Daerah Schieland dan Krimpenerwaard, Belanda; serta Ulsan, Korea Selatan.

Globalisasi yang membawa tantangan baru atas munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional, mendorong desentralisasi dalam praktik diplomasi. Tren demokratisasi yang membawa ide tentang desentralisasi mendorong peran yang semakin besar dari provinsi. Dikaitkan dengan konsepsi diplomasi sebagai cara mencapai kepentingan (nasional), meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan lokal juga berimplikasi pada

konsepsi dan praktik diplomasi tradisional. Dengan adanya independensi terikat serta legitimasi yang dimiliki, selanjutnya pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan globalisasi melalui kerja sama dengan aktor-aktor global dalam kerangka hubungan transnasional.

Berbagai istilah dimunculkan sebagai upaya konseptualisasi fenomena kontemporer berupa hubungan yang dijalin oleh aktor-aktor sub-negara di level global, sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu serta poin yang ingin ditekankan. Dengan kata lain, “*subnational foreign affairs*”, “*subnational foreign policy*”, “*sub-state diplomacy*”, “*multi-layered diplomacy*”, “*constituent diplomacy*”, “*local diplomacy*”, “*local foreign policy*”, “*regional diplomacy*”, “*plurinational diplomacy*”, “*post-diplomacy*”, “*micro diplomacy*”, “*foreign policy localization*”, “*catalytic diplomacy*”, hingga “*paradiplomacy*” (Tavares, 2016; Kuznetsov, 2015) yang ditemukan dalam kajian literatur secara pragmatis dapat dikatakan merujuk pada fenomena yang sama.

Implementasi dari paradiplomasi salah satunya adalah penerapan kerja sama antar kawasan berupa *sister city*. *Sister city* adalah bentuk kerja sama intens yang dirintis oleh dua kota yang memiliki ciri khas kesamaan tertentu, biasanya berupa kesamaan demografi penduduk, latar belakang budaya, pengembangan potensi ekonomi dan lain-lain. Visi pembangunan Kota Semarang tahun 2016-2021 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang terpilih adalah “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Berdasarkan visi pembangunan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan visi tersebut, dalam kaitannya dengan paradiplomasi Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya paradiplomasi, Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang hebat?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya paradiplomasi Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan visi Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat. Sementara itu, tujuan khusus penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh gambaran tentang potensi perdagangan dan jasa Kota Semarang;
- b. Untuk mengetahui sejarah paradiplomasi Pemerintah Kota Semarang; dan
- c. Untuk mengidentifikasi paradiplomasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan visi “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”.

1.4 Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dapat ikut berkontribusi dalam mewujudkan keunggulan penelitian Universitas Diponegoro dan meningkatkan daya saing Universitas Diponegoro. Penelitian ini merupakan penelitian sosial humaniora, yang sejalan dengan fokus bidang penelitian Universitas Diponegoro, yakni pengembangan dan pemberdayaan sumber daya lokal Indonesia untuk peningkatan ketahanan dan keamanan. Selama ini, konsep-konsep yang dipelajari dalam Ilmu Hubungan Internasional dianggap sulit untuk membumi dengan kondisi di akar rumput.

1.5 Luaran Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi ilmiah yang bermutu dan bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Kota Semarang. Luaran penelitian ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan prosiding dalam konferensi internasional.

1.6 Tinjauan Pustaka

Negara (dalam hal ini pemerintah pusat) tidak lagi menjadi satu-satunya aktor hubungan internasional Muncul aktor-aktor lain di luar Negara, seperti *non-govermental organizations* (NGOs) dan perusahaan multinasional. Lebih lanjut, tren demokratisasi yang membawa ide tentang desentralisasi mendorong peran yang semakin besar dari Daerah, sebagai unit pemerintahan di bawah negara. Dengan adanya independensi terikat serta legitimasi yang dimiliki, selanjutnya pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memanfaatkan globalisasi melalui kerja sama dengan aktor-aktor global dalam kerangka hubungan transnasional.

Kemunculan Kota sebagai salah satu aktor penting dalam hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari berkembangnya desentralisasi. Tujuan desentralisasi menurut perspektif desentralisasi administrasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and services*, serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah, sebagaimana disampaikan oleh Rondinelli (1983, 4 dalam Syarif, 2008). Jika Rondinelli menekankan pada aspek pemerintah, maka Ruland (1992, Syarif, 2008), lebih menekankan aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi sebagai tujuan utama desentralisasi, sehingga Ruland memberikan definisi sebagai berikut: “*Decentralisation, as a corollary local autonomy, is seen as a positive contribution to increase people participation, which would eventually lead to socio-economic development*” (1992, 3).

Dalam posisinya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki fungsi sebagai *hub* atau pusat dari aktifitas strategis yang terjadi di wilayahnya. Dalam rangka memenuhi fungsi tersebut, Pemerintah Kota Semarang terfasilitasi oleh kerangka institusi berupa kebijakan desentralisasi yang dijalankan di tengah arus demokratisasi sebagai pemenuhan Pemerintah Pusat atas prinsip akuntabilitas dan bagi daerah. Selanjutnya melalui kerangka tersebut, Pemerintah Kota Semarang, beserta pemerintah kabupaten sekitar yang tergabung dalam *hinterland*-nya, memanfaatkan peluang yang ditawarkan globalisasi dengan menjadi aktor paradiplomasi, yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis pada pengembangan potensi lokal.

Dengan labelnya sebagai kota investasi dan perdagangan, lahan yang ada di Kota Semarang lebih banyak diperuntukkan sebagai kawasan industri seperti Taman Industri BSB, Kawasan Industri Candi, BSB Bonded Zone, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma (Seputar Semarang, n.d.), Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru. Tingginya arus investasi yang masuk ke Kota Semarang dalam dekade terakhir membuat kawasan industri dengan luas total 1.029 ha ini sudah penuh (Lazuardi, 2014) sehingga dalam pembuatan kebijakan pembangunan, Pemerintah Kota mulai mendorong pembangunan kawasan industri di wilayah *hinterland* sekitarnya.

Banyaknya kawasan industri yang telah berkembang di Kota Semarang ini kemudian menjadi modalitas tersendiri karena telah tersedianya suprastruktur dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi yang meliputi investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang memadai. Terintegrasinya aktifitas ekonomi dari hulu ke hilir ini selanjutnya menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan paradiplomasinya, yang kemudian dikemas dalam paket kebijakan pembangunan berbasis *Meetings, Incentives, Conferences, and Events* (MICE) yang dikemas dengan romantisme budaya yang dimiliki sebagai bentuk modalitas sosial-budaya Kota Semarang. Sebagai bentuk realisasi dari arah kebijakan ini, pada tahun 2007 pemerintah Kota Semarang di bawah Walikota Sukawati Sutawidjijanto mencanangkan program “Semarang Pesona Asia (SPA)”.

Dikaitkan dengan konsepsi diplomasi sebagai cara mencapai kepentingan (nasional), meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan lokal juga, berimplikasi pada konsepsi dan praktik diplomasi tradisional. Kemunculan aktor-aktor baru tersebut mendorong Rogier van der Pluijm dan Jan Melissen (2007) untuk mengkaji aktor diplomasi lain yang tidak kalah penting, yakni Kota atau Lokal. Menurut van der Pluijm dan Melissen, peran Kota perlu diperhitungkan di era globalisasi saat ini. Melalui tulisannya yang berjudul “*City Diplomacy: The Expanding Role of Cities in International Politics*”, keduanya memperkenalkan konsep baru yang dikenal dengan *city diplomacy*, atau diplomasi lokal, atau paradiplomasi¹.

Diplomasi lokal adalah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan aktor-aktor internasional lainnya, dimana tujuannya adalah untuk mencapai kepentingan daerah (van der Pluijm & Melissen, 2007, 6). Warga negara tidak dapat disebut sebagai aktor dari diplomasi lokal, kecuali tergabung dalam gerakan sosial yang memang mewakili kota secara keseluruhan. Berdasarkan definisi tersebut, diplomasi lokal dapat juga dianggap sebagai salah satu bentuk desentralisasi pengelolaan hubungan internasional, karena Kota adalah aktor utamanya. Dalam banyak kasus, walikota adalah aktor yang seringkali diberi tanggung jawab untuk menjalankan hubungan luar negeri kotanya.

¹ Dalam penelitian ini, istilah diplomasi lokal dan paradiplomasi akan digunakan secara bergantian.

Segala hubungan luar negeri yang dijalankan Kota harus tetap mengacu pada politik luar negeri. Proses diplomasi Negara dan Kota akan berubah seiring dengan perubahan tujuan politik luar negeri. Dengan demikian, Negara dan Kota seakan berada pada rute yang sama, tetapi beda mobil. Negara dan Kota sama-sama terlibat dalam aktivitas diplomatik bukan untuk memperebutkan lahan yang sama, tetapi untuk saling melengkapi (van der Pluijm & Melissen, 2007, 12). Karena, Negara tidak lagi mampu menjalankan seluruh aktivitasnya sendiri, dan aktor seperti Kota perlu terlibat.

Berangkat dari *self-interest* ini, Kota menjalin kerja sama dalam hubungan internasional, salah satunya melalui yang dikenal dengan *sister city*. Tidak dapat dipungkiri, aktivitas diplomasi lokal didorong oleh *self-interest* suatu Kota. Aspek keamanan, pembangunan, ekonomi, kultural, atau pun peningkatan jaringan dan kerja sama, dapat dicapai dengan melakukan diplomasi.

Tidak dapat dipungkiri, diplomasi berkaitan erat dengan komunikasi. Kemampuan Negara untuk mengkomunikasikan kebijakan luar negeri atau budayanya ke *international audiences* akan mempengaruhi *nation branding* negara tersebut. Dengan demikian, akan semakin banyak masyarakat internasional yang tertarik dengan negara tersebut. Jian Wang (2005) menjelaskan bahwa, permasalahannya, “... *one of the salient issues facing public diplomatic communication is the messenger problem*” (Wang, 2015). Artinya, tidak semua negara memiliki kredibilitas yang baik dalam melakukan komunikasi tersebut, sehingga komunikasi atau informasi tidak dapat tersampaikan dengan efektif atau bahkan menjadi tidak produktif. Menyadari pentingnya peran aktor *sub-national* dalam membentuk *national branding* di era globalisasi ini, mendorong Wang (2015) untuk membahas komunikasi yang efektif di level lokal.

Wang (2015) menjelaskan bahwa ada sedikitnya tiga peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni sponsor, koordinator, dan penghubung (*communicator*). Sebelumnya, ketiga peran ini dijalankan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi, aktor daerah juga perlu didorong untuk mampu menjalankan tiga peran tersebut (Wang, 2015). Dengan demikian, implementasi kerja sama menjadi lebih jelas, dan tidak akan terjadi ‘*sleeping agreements*’.

Sejalan dengan pemikiran Held dkk (1999), Wang tidak melihat pentingnya aktor *sub-national* ini kemudian menggeser peran Negara dalam diplomasi publik, dan

membuat kekuatan (*power*) Negara hilang. Sebaliknya, pemerintah pusat berbagi kekuatan (*sharing power*) dengan pemerintah daerah, untuk memaksimalkan lokalitas (Wang, 2015, 35). *Sharing power* yang dimaksud di sini adalah tentunya terkait komunikasi. Untuk isu-isu yang bersifat '*low politics*', dikomunikasikan oleh pemerintah daerah. Sementara, isu '*high politics*' seperti perang dan pertahanan, tetap menjadi porsi pemerintah pusat. Di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 11.

Peran pemerintah daerah sebagai sponsor, koordinator, dan penghubung digambarkan Wang melalui tiga skenario, yang digambarkan seperti di bawah ini:

Gambar 1.1 Peran Pemerintah Daerah dalam Diplomasi

Skenario hubungan Pusat dan Daerah	Tipe peran		
	Sponsor	Koordinator	Penghubung
1	Daerah	Daerah	Daerah
2	Nasional	Daerah	Daerah
3	Nasional	Nasional	Daerah

Sumber: diolah dari Wang (2015, 40)

Seperti yang disebutkan di atas, seiring dengan munculnya aktor-aktor baru selain Negara (pemerintah pusat), perlu kemudian dipertimbangkan pembagian kekuatan antara Pusat dan Daerah. Skenario I menempatkan Daerah sebagai aktor yang menggantikan Negara menjalankan ketiga peran diplomasi yang ada. Skenario II, Pusat hanya menginisiasi dan mensponsori program kerjasama, sementara manajemen proses diplomasi dan interaksi secara langsung diserahkan kepada Daerah. Program ini lebih banyak melibatkan pemerintah daerah, dimana koordinasi antara Pusat dan Daerah tidak banyak diperlukan (Wang, 2015, 39). Skenario III, mengacu pada diplomasi yang membutuhkan dukungan Pusat dan koordinasi dengan Daerah untuk mengeksekusi program. Dalam hal ini, Pusat memegang peranan penting dalam mengembangkan konsep program dan terikat melihat program bagaimana tersebut dijalankan atau

direalisasikan (Wang, 2015, 40). Artinya, Daerah berperan dalam membuat jaringan kerja sama yang sejalan dengan kepentingan nasional; menjadi penghubung secara langsung. Sementara, Pusat memiliki peran untuk mendukung dan menjadi fasilitator, sehingga program dirancang dapat dijalankan dengan baik oleh Daerah.

Beberapa negara bagian memiliki kondisi geografis yang terlalu besar, dengan berbagai permasalahan, sehingga perlu kebijakan luar negerinya sendiri. Terkait hal tersebut, sebagian daerah memilih membuat peraturan daerah terkait hubungan internasional, sementara beberapa lainnya bahkan memutuskan untuk mendirikan *paraconsulate* di negara lain (Mathews, 1996, 61). Apapun keputusan yang dibuat Daerah, harus tetap sejalan dengan landasan hubungan internasional yang berlaku di negara tersebut.

Berdasarkan undang-undang yang ada, pemerintahan dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan kebijakan yang kemudian diambil oleh Pemerintah Indonesia, agar dapat menjalankan tugas-tugas tersebut (bappenas.go.id, 2009). Dengan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, maka model kerja sama *sister city* yang dapat diterapkan adalah di Kota Semarang adalah Skenario III, yang menempatkan Pusat sebagai sponsor dan koordinator, sementara Kota sebagai penghubung.

Sebagai aktor yang memahami lokalitas di daerahnya, Kota dapat melakukan diplomasi dengan Kota di negara lain yang memiliki kemiripan. Pemerintah Kota Semarang dapat menjadi penghubung Pemerintah Indonesia dengan Kota di negara lain, dalam bidang perdagangan. Sementara, Pusat, melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, misalnya, berperan dalam mensponsori dan memfasilitasi diplomasi tersebut. Sehingga, aktivitas hubungan luar negeri Pemerintah Kota Semarang tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia, dan meminimalisir adanya '*sleeping agreement*' di Kota Semarang. Lebih lanjut, hal ini dapat mendukung terealisirnya Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang hebat.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden, dengan menggunakan metode tertentu (Silalahi, 2006, 257). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara. Melalui metode studi pustaka, data-data dalam penelitian didapatkan dari literatur berupa buku-buku, buletin cetak, serta sumber-sumber artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Lebih lanjut, guna mendapatkan pengetahuan langsung dari lapangan, peneliti melakukan observasi sistematis lapangan dimana peneliti akan mengamati perilaku dan kebijakan Pemerintah Kota Semarang serta wawancara terbuka dan berkelompok. Sasaran utama dari wawancara adalah Pemerintah Kota Semarang, utamanya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi dan implementasi kerja sama *sister city* meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan dinas terkait. Wawancara akan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang meliputi: a) menentukan subjek atau informan yang diwawancarai, b) mempersiapkan wawancara, c) melakukan wawancara dan memelihara agar wawancara produktif, dan d) menghentikan wawancara dan memperoleh rangkuman hasil wawancara.

1.7.2 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif; dimana peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini berlandaskan pada pemikiran Miles dan Huberman yang menegaskan bahwa analisis data kualitatif meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Silalahi, 2006, 257). Tahap reduksi data merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan berbagai data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Setelah tahap mereduksi data, peneliti lanjut pada tahap penyajian data, dimana peneliti mengorganisir data yang telah direduksi, disusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan mempermudah peneliti merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Langkah yang terakhir yakni menarik kesimpulan berdasarkan temuan, dan melakukan verifikasi data.

BAB II

PROFIL LOKASI PELAKSANAAN PENELITIAN:

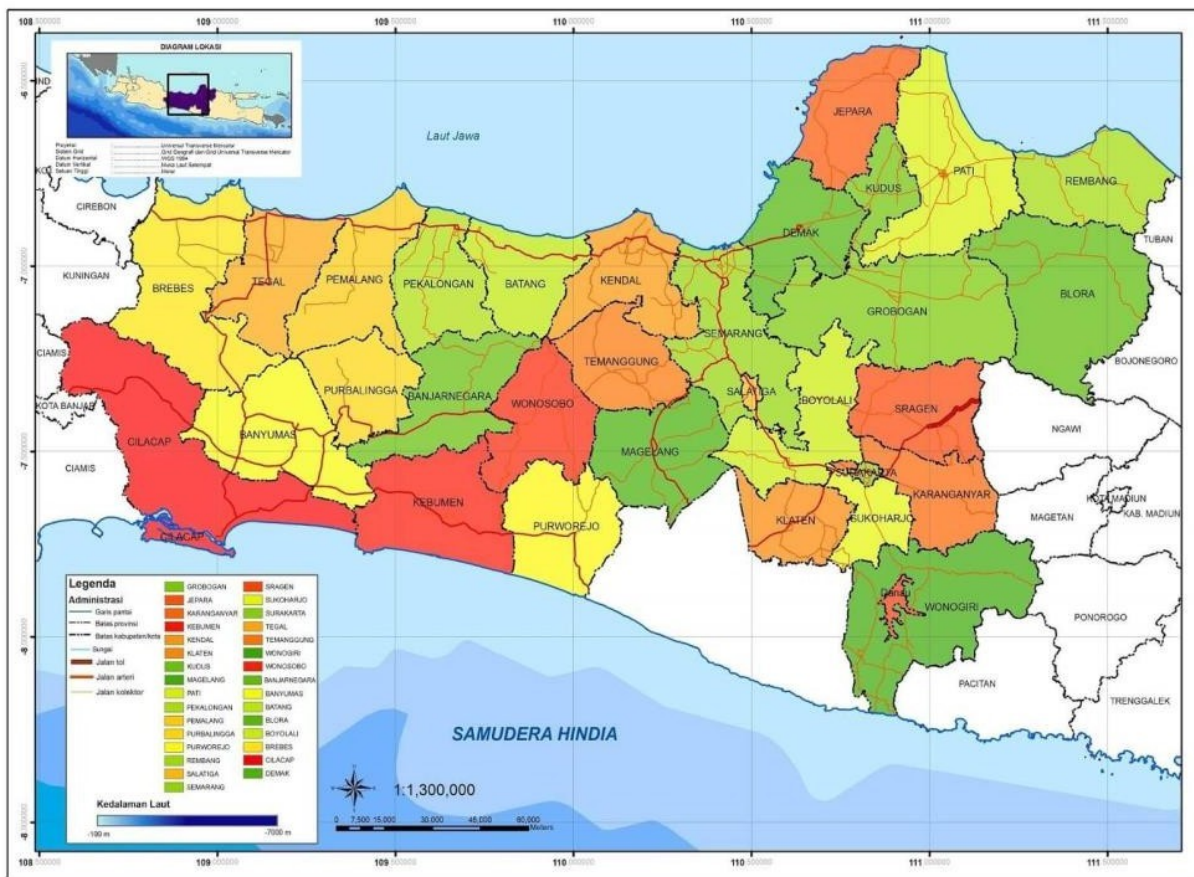
KOTA SEMARANG

Kota Semarang dengan luas wilayah 373,67 km² secara administratif terbagi menjadi sedikitnya 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak; sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang; dan sebelah utara dibatasi dengan Laut Jawa. Secara astronomis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara 6°50' - 7°10' LS dan garis 109°35' -110°50' BT. Berikut ini adalah gambaran peta Kota Semarang:

Gambar 2.1

Peta Kota Semarang

Sumber: Bappeda Kota Semarang



Kota Semarang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara; Kabupaten Semarang di sebelah selatan; Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan di sebelah timur; dan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016, Kota Semarang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki posisi geostrategis, karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yang sedikitnya terdiri dari empat simpul gerbang, yaitu koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis, seperti Magelang, Surakarta, yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu; koridor timur ke arah Kabupaten Demak atau Grobogan; dan koridor Barat menuju Kabupaten Kendal.

Persebaran penduduk Kota Semarang jika dilihat dari jumlah penduduk pada masing-masing wilayah kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang tidak merata. Secara keseluruhan, berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk Kota Semarang hingga tahun 2014 mencapai 1.583.188 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 786.789 jiwa (49,7%), dan penduduk perempuan sejumlah 796.399 jiwa (50,3%). Jumlah tersebut meningkat sebesar 11.083 jiwa. dibandingkan jumlah penduduk di tahun 2013, yang berjumlah 1.572.105 jiwa.

Berdasarkan Bappeda Kota Semarang, pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Semarang dipengaruhi oleh proses alami, yakni kelahiran dikurangi kematian penduduk, serta dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari daerah sekitar Kota Semarang, yang merupakan imbas dari daya tarik Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai salah satu pusat perekonomiasn dan pusat pendidikan.

2.1 Kondisi Umum

Kota Semarang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang sebagai Kota Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. **Kota Semarang memiliki Visi dan Misi** yang tercantum dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, yaitu dengan Visi “Semarang Kota Metropolitan yang Religius, Tertib dan Berbudaya”. Adapun Misi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas.

2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal.

2.2 Kondisi Lingkungan

Kota Semarang merupakan kota dengan letak geografis yang strategis karena berada di jalur lalu lintas ekonomi di Pulau Jawa, dengan letak geografis antara garis 6o50'–7o10' Lintang Selatan dan garis 109o35'–110o50' Bujur Timur, dengan batas- batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Suhu Udara berkisar antara 20-30 Celcius dan suhu rata-rata 27 Celcius. Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 sampai 359,00 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang juga terbagi atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Daerah perbukitan/dataran tinggi di sebelah selatan kota yang dikenal dengan sebutan Semarang atas mempunyai ketinggian 90–359 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75–3,5 meter diatas permukaan laut.

Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan sebuah pondasi pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur, dan koridor barat. Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan raya) serta jaringan transportasi udara, yaitu bandar udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Jawa Tengah.

2.3 Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa

Kota Semarang, yang berdiri pada tanggal 2 Mei 1547 dan saat ini telah memasuki usia ke-469 tahun, merupakan salah satu kota metropolitan dan terbesar ke kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan. Posisi ini dapat dimengerti karena Kota Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah. Kota yang letak wilayahnya dikelilingi oleh beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan, memiliki posisi geostrategis karena

berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ Grobogan, dan Barat menuju Kabupaten Kendal.

Dengan demikian maka dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara (dengan bandara bertaraf internasional) yang merupakan potensi bagi simpul transportasi tidak hanya dalam lingkup Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah, melainkan internasional (khususnya negara-negara ASEAN). Kondisi ini menjadi kekuatan pusat wilayah nasional bagian tengah dalam rangka hubungan dengan luar Jawa dan luar negeri di era globalisasi yang tidak mengenal batas, ruang, dan waktu ini.

Kota Semarang ini semakin menjadi penting dan layak untuk diperhitungkan mengingat keberadaannya secara topografi yang sangat menguntungkan sehingga dapat mendorong Kota Semarang menjadi kota pariwisata yang diperhitungkan oleh tidak hanya wisatawan domestik saja tetapi juga internasional. Dengan demikian maka akan dapat meningkatkan pendapatan (asli) daerah sebagai penopang pembangunan dan kesejahteraan rakyat di era desentralisasi dengan otonomi yang berprinsip “seluas-luasnya dan bertanggung jawab” yang ditekankan pada Era Reformasi ini. Kota yang berada di dataran rendah dan dikelilingi oleh beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur, dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan, secara topografi wilayahnya terdiri atas wilayah pegunungan/perbukitan (dengan ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut) dan pantai (dengan ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut). Kota ini juga disebut memiliki wilayah yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian wilayah yang dikenal sebagai Kota Atas dan bagian wilayah lain yang disebut sebagai Kota Bawah. Lebih dari itu, karena keberagaman dan keunikan yang dimilikinya, maka berbagai sebutan nama untuk Kota Semarang juga menjadi beragam.

Diluar karena keuntungan topografinya, keberagaman, keunikan dan sejarah yang dimilikinya menjadikan Kota Semarang memiliki beragam nama yang cukup menarik serta layak dan *marketable* untuk “dijual”, di antaranya yaitu:

2.3.1 Venice Van Java

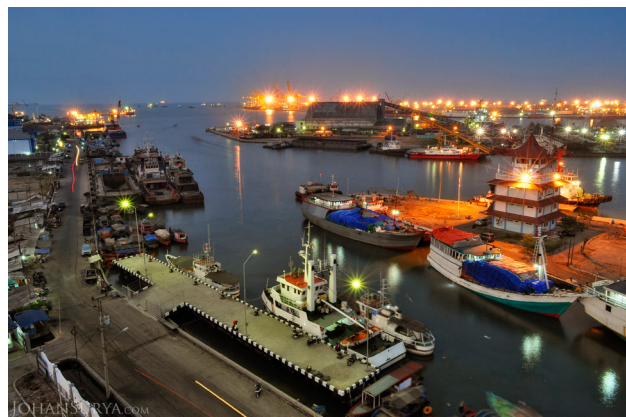
Di beberapa negara di dunia memiliki kota dengan sebutan venesia (yang berarti sungai atau kanal), diantaranya seperti Venesia-Itali. Kota Semarang juga dikenal sebagai “*Venice Van Java*”. Nama ini diberikan dengan dasar pemikiran bahwa karena terdapatnya banyak sungai dan kanal (yang merupakan salah satu sarana transportasi yang diandalkan pada masa kependudukan Belanda di Semarang) melintasi tengah Kota Semarang. Beberapa foto dibawah ini merupakan gambaran Kota Semarang sebagai “*Venice Van Java*” sebagaimana dimaksud.

2.3.2 The Port of Java

Untuk kepentingan pemasaran pariwisata, pemerintah kota semarang memberikan julukan *The Port of Java* "Pelabuhan-nya Jawa". Hal tersebut sebagai upaya pencitraan Kota Semarang sebagai pusat pelabuhan di Pulau Jawa dengan Tanjung Emas-nya. Apalagi di jaman dahulu, Kota Semarang merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Nusantara yang sangat ramai. Beberapa *photo* dibawah ini menggambarkan Kota Semarang sebagai *The Port of Java*.

Gambar 2.3.2

Kota Semarang sebagai *The Port of Java*
Pelabuhan Tanjung Emas



Sumber: Pemkot Semarang

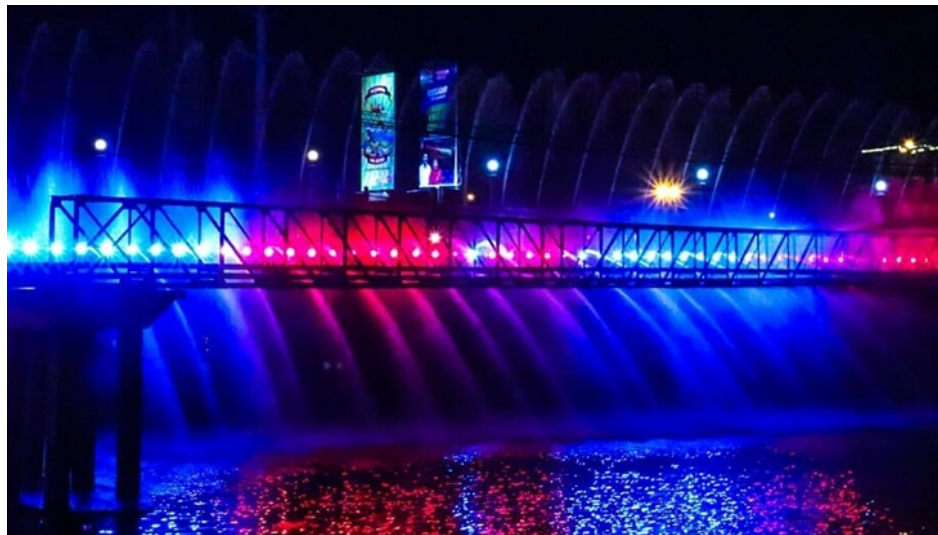
2.3.3 Beauty of Asia

Pada tahun 2007, Kota Semarang memiliki sebutan baru yakni *Beauty of Asia* yang diperkenalkan berbarengan dengan program pariwisata Semarang Pesona Asia (SPA). Sebutan ini berdasarkan Kota Semarang memiliki keindahan baik alam maupun budayanya. Keindahan

kota tersebut diantaranya dapat digambarkan bagaimana kota bawah dilihat dari kota atas sebagaimana terlihat dalam *photo* berikut di bawah ini.

Gambar 2.3.3 *Beauty of Asia*

Keindahan Kota Semarang dilihat dari Tugu Tabanas Gardu Pandang Gombel
dan Bridge Fountain Kota Semarang



Sumber: DetikTravel.com

Simpang Lima Ciy Center (SLCC) adalah salah satu *Central Business District (CBD)* atau Kawasan Bisnis Terpadu yang terletak di Semarang Pusat dan salah satu CBD yang berkembang

di jantung kota Semarang. Tidak heran apabila banyak bangunan-bangunan jangkung atau biasa disebut pencakar langit hadir di kawasan ini. Beberapa signature building yang menjadi ciri khas dari SLCC Semarang adalah Ciputra Swiss-Belhotel International Hotel Semarang, Ciputra Mall, Horison Hotel, Plaza Simpang Lima, Louis Kienne Serviced Apartment Hotel, HA-KA Hotel (coming soon), Santika Premiere Hotel, Wisma HSBC, INDOSAT Ooredoo Tower, Living Plaza ACE Hardware & InForma, Gramedia Center Pandanaran, Accor Ibis Simpang Lima Hotel, Amaris Simpang Lima Hotel, Tentrem Mixed-Use Tower (coming soon), Simpang Lima Residences, SMC (Semarang Medical Center) Telogorejo Hospital, Pandanaran Hotel, DBS Center, @Hom Hotel, SentraLand Superblock, Graha Bank Indonesia, Plaza Telkom, Wisma Telkomsel, XL Axiata Center Simpang Lima, Bank Mandiri Plaza, CitiBank Square, *Pramuka Building*.

Di samping Simpang Lima, pusat Kota Semarang yang juga terkenal adalah dengan Tugu Muda nya, sebagaimana gambar berikut ini.



Keindahan budaya di Kota Semarang yang menarik dan unik adalah hadirnya vihara Sam Poo Kong. Hal ini karena sejarah Indonesia tidak terlepas juga dengan orang-orang China yang berlabuh di Semarang. Tempat ini merupakan petilasan pendaratan laksamana dari negeri Tiongkok yang sangat populer, yaitu Laksamana Cheng Ho, yang kemudian diabadikan oleh Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu tempat wisata budaya. Jika kita menapakkan kaki di area ini serasa kita terbang ke negeri Tiongkok.

2.4 Outstadt atau Little Netherland

Dengan banyaknya bangunan kuno peninggalan jaman Belanda yang bercirikan atau bergaya bangunan khas Belanda maupun Eropa yang masih berdiri kokoh, Kota Semarang mendapat julukan sebagai Belanda kecil atau *Little Netherland (outstadt)* khususnya kawasan Kota Lama. Komplek bangunan kuno peninggalan Belanda yang berdiri megah di Kota Lama ini kerap menarik perhatian wisatawan. Kota Lama merupakan pusat pemerintahan di masa penjajahan Belanda oleh karenanya hampir semua bangunan yang berdiri disana menyajikan kemegahan arsitektur Eropa di masa lalu. Saat ini komplek bangunan Kota Lama telah beralih fungsi, namun masih ada satu bangunan yang hingga sekarang fungsinya belum berubah yakni Gereja Blenduk. Dikatakan sebagai Gereja Blenduk karena gereja ini memiliki atap kubah yang berbentuk setengah lingkaran yang mana dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah blenduk. Gereja Blenduk masih aktif digunakan untuk beribadah oleh umat kristiani setiap Hari Minggu. Gereja Blenduk ini merupakan ikon Kota Lama.

Gambar 2.4 Kapsul Waktu di Tengah Kota Semarang (Kafe Spiegel di Kota Lama)



2.5 Kota Lumpia

Sebutan ini dilatarbelakangi oleh makanan kecil khas Semarang yang merupakan hasil perpaduan dua alikuturasi antara budaya Tiongkok dengan Jawa yang disebut dengan Lumpia. Makanan ini cukup terkenal di seluruh Indonesia, selain makanan kecil yang lain khas dari Kota Semarang, yaitu wingko babat dan bandeng presto.

Gambar 2.5 Lumpia, Bandeng Presto, dan Wingko Babat yang menjadi Ciri Khas Kota Semarang



2.6 Kota Jamu

Sebutan lain Kota Semarang adalah sebagai Kota Jamu. Sebutan ini diberikan karena di Kota Semarang terdapat perusahaan jamu (tradisional) tertua di Indonesia, yaitu PT Jamu Jago. Perusahaan jamu yang besar dan tua lainnya adalah PT Jamu Nyonya Meneer. Kedua perusahaan jamu ini kemudian diabadikan dengan berdirinya Museum Jamu Jago dan Nyonya Meneer. Adapun perusahaan jamu yang lain yang saat ini sangat terkenal di Indonesia dan bahkan di mancanegara adalah Jamu Sido Muncul.

Pembangunan di Kota Semarang sendiri telah lama berfokus pada pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan industri, mengingat bidang-bidang tersebut memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di Kota Semarang. Di bidang perdagangan sendiri, Kota

Semarang memiliki berbagai komoditas yang diekspor seperti hasil perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, makanan, kerajinan, dan perindustrian. Kuantitas komoditas tersebut juga cenderung memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Realisasi Volume Ekspor Non Migas menurut Sektor dalam Kuintal

o.	Sektor/Komoditas	2012	2013	2014
.	Perkebunan	402.824,17	13.278.572	18.092.907
.	Kehutanan	27.327,28	68.404.573	103.606.580
.	Pertanian	30.918,57	2.777.458	4.314.521
.	Perikanan	11.652,45	820.691	450.839
.	Peternakan	349,51	42.864.797	51.393.812
.	Rempah-rempah	4.564,01	359	30.440
.	Makanan	30.984,12	1.575.889	1.270.595
.	Kerajinan	9.353,78	20.316.069	23.567.630
.	Perindustrian	3.205.188,77	78.376.186	101.634.427

Sumber: Semarangkota.bps.go.id

Tabel 2.3 tersebut menunjukkan sektor perindustrian sebagai sektor yang paling besar memberikan kontribusi ekspor. Akan tetapi secara keseluruhan, masing-masing sektor cenderung mengalami peningkatan kuantitas ekspor dari tahun ke tahun. Untuk menunjang hal tersebut, perlu adanya pengelolaan tenaga kerja yang baik sebagai salah satu unsur yang berperan dalam meningkatkan produktivitas dalam kegiatan produksi.

BAB III

PERAN PARADIPLOMASI DALAM MEWUJUDKAN SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT

Dalam posisinya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki fungsi sebagai *hub* atau pusat dari aktifitas strategis yang terjadi di wilayahnya. Dalam rangka memenuhi fungsi tersebut, Pemerintah Kota Semarang terfasilitasi oleh kerangka institusi berupa kebijakan desentralisasi yang dijalankan di tengah arus demokratisasi sebagai pemenuhan Pemerintah Pusat atas prinsip akuntabilitas dan bagi daerah. Selanjutnya melalui kerangka tersebut, Pemerintah Kota Semarang, beserta pemerintah kabupaten sekitar yang tergabung dalam *hinterland*-nya, memanfaatkan peluang yang ditawarkan globalisasi dengan menjadi aktor paradiplomasi, yang utamanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbasis pada pengembangan potensi lokal.

3.1 Peran Pemerintah Pusat dalam Paradiplomasi

Globalisasi menyebabkan pergeseran isu hubungan internasional yang pada awalnya fokus pada isu *high politics* dengan mengedepankan perihal material menjadi fokus pada isu kerjasama melalui jalur diplomasi. Diplomasi pada awalnya bersifat tradisional dengan negara menjadi aktor utama dalam diplomasi. Namun, di era modern seiring meningkatnya kebutuhan negara untuk mencapai kepentingan nasional dalam rangka kesejahteraan warga negaranya, diplomasi dijalankan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat. Globalisasi menyebabkan pola diplomasi yang mulanya diplomasi tingkat tinggi menjadi *non-central government* yang berarti aktor diplomasi berada pada pemerintah daerah atau dikenal dengan paradiplomasi (Mukti, 2013).

Indonesia dalam menjalankan diplomasinya fokus pada pengembangan bidang industri, perdagangan, teknologi, dan lain lain. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pemerintah pusat melakukan penyerapan modal asing yang diarahkan kepada daerah dengan potensi yang sesuai. Sumber daya alam yang dimiliki daerah akan lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan apabila dana investasi diarahkan langsung kepada pemerintah daerah sebagai *stakeholder* paradiplomasi. Dengan demikian, pemerintah daerah akan lebih maksimal mengembangkan

potensi sumber daya alam dan manusia dalam rangka meningkatkan pembangunan. Hal itu juga sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memajukan perekonomian rakyat. Untuk melegalkan peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi di wilayahnya maka pemerintah merumuskan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi menjadi Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah dalam rangka membangun pembangunan di daerah (Imawan, 2006).

Dalam meningkatkan *ecotourism* Kota Lama Semarang, sudah ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat menjadikan kawasan Kota Lama Semarang dapat menjadi suatu kawasan yang memiliki nilai pariwisata. Untuk mengembangkan kehidupan kultural di Kota Lama Semarang, telah direncanakan program seperti revitalisasi bangunan kuno peninggalan Belanda yang tadinya masih berdiri namun dengan kondisi yang sangat tidak layak. Pemerintah Kota Semarang juga mengembangkan museum yang berisikan tentang Kota Lama, menentukan Landmark kota dan melakukan peningkatan terhadap benda hasil budaya dan juga kerajinan serta masakan khas.

Tidak hanya dalam segi infrastuktur, Pemerintah Kota Semarang juga sudah berusaha dalam menghidupkan usaha usaha dan juga melakukan peningkatan di sektor entertainment. Hal ini dapat dilihat dari dilakukannya pengembangan UMKM, adanya pedagang di sekitar kawasan Kota Lama dan juga menyediakan kegiatan yang dapat diikuti masyarakat Kota Semarang seperti frestival yang bertemakan budaya sehingga dapat mempromosikan kesenian-kesenian Kota Semarang. Bahkan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya konservasi pada kawasan Kota Lama Semarang, dengan mengacu pada Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Dati II Semarang No.646/50/1992 tentang Konservasi Bangunan-Bangunan Kuno/Konservasi Bersejarah di Wilayah Dati II Semarang, Perda No.8/2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama, dan kemudian Peraturan Wali Kota No.12/2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Lama, Perwal No.37/2011 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perda No.14/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Upaya pemerintah tersebut diantaranya akan mengkonservasi sebanyak 105 bangunan peninggalan zaman Belanda di kawasan Kota Lama Semarang, sebagai bentuk dari penataan agar bisa menjadi destinasi wisata bagi masyarakat. Dengan total bangunan yang ada di kawasan Kota Lama sebanyak 245 bangunan, dengan perincian 177 bangunan milik pribadi dan

68 bangunan milik perusahaan, baik negeri maupun swasta, dan yang akan dikonservasi sebanyak 105 bangunan. Bangunan yang akan dikonservasi tersebut, diantaranya adalah 31 bangunan di Jalan Letjen Soeprapto, enam bangunan di Jalan Mpu Tantular, dan tujuh bangunan di Jalan Merak.

Mulai disadari bahwa diperlukan adanya strategi yang menghubungkan antara wisata dan konservasi alam serta budaya. Diawali dengan adanya The Pacific Asia Travel Association yang mengadakan konferensi mengenai strategi pembangunan dengan mempertimbangkan sekor wisata dan lingkungan yang lebih baik. Kemudian dilanjutkan dengan banyak gerakan yang sama seperti Deklarasi Manila dan UNEP. Menurut Goodwin (1997) kegiatan ekoturisme baik secara langsung atau tidak, memiliki peran dalam upaya melindungi dan mengelola habitat alam dan spesies yang ada di dalamnya. Penjelasan tersebut dijabarkan dengan tiga keuntungan yang didapatkan dari kegiatan ekoturisme.

Pertama, ekoturisme merupakan cara yang paling benar dan efektif untuk menghasilkan keuntungan sekaligus mengelola dan melindungi destinasi wisata. Dengan demikian ekoturisme merupakan strategi investasi jangka panjang untuk keberlangsungan destinasi wisata tersebut. Kedua, kegiatan ekoturisme memungkinkan masyarakat sekitar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan destinasi wisata. Masyarakat memiliki peran kunci dalam pelaksanaan kegiatan ekoturisme sehingga dibutuhkan terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak pengelola dan masyarakat sekitar. Diperlukan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari perlindungan dan pengelolaan destinasi wisata. Ketiga, kegiatan ekoturisme secara langsung maupun tidak akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian dan pengetahuan destinasi wisata bagi para turis. Para turis tersebut memiliki peran sebagai penyumbang suara/aspirasi, penyumbang dana serta pemimpin potensial yang dapat mewujudkan kegiatan ekoturisme.

Dengan demikian terdapat aspek penting yang terdapat dalam ekoturisme yang pertama yaitu konservasi yang merupakan tanggung jawab dalam pemeliharaan destinasi wisata. Konservasi dan pemeliharaan terhadap destinasi wisata merupakan investasi jangka panjang yang dapat membuat destinasi wisata bertahan lama. Kedua, terjalinnya hubungan yang harmonis antara aktivitas wisata, alam dan budaya, serta masyarakat sekitar. Hubungan harmonis yang terjalin memastikan bahwa seluruh strategi yang direncanakan akan terlaksana dengan efektif dan baik. Ketiga, adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunannya.

Dengan segala strategi dan harapan yang ingin dicapai maka yang menjadi tujuan adalah terjadinya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Apabila konsep ekoturisme juga diterapkan pada kawasan Kota Lama Semarang maka segala keuntungan diatas akan didapatkan. Mulai dari konservasi dan perlindungan Kota Lama, masyarakat dapat mendapatkan keuntungan dari konservasi tersebut, hingga kesadaran yang tinggi dari para wisatawan untuk ikut berkontribusi menjaga dan melestarikan. Keuntungan yang didapat merupakan keuntungan jangka panjang yang akan terus berkembang. Dikarenakan apabila konservasi yang dilakukan baik maka masyarakat sekitarpun akan mendapat manfaat dari para wisatawan yang datang dan puas dengan Kota Lama, sehingga dari kepuasan tersebut akan menjadikan para wisatawan juga menjadi agen untuk melestarikan Kota Lama. Berdasarkan segala keuntungan yang didapat dari ekoturisme, tidak dapat dipungkiri bahwa ekoturisme hadir sebagai strategi pembangunan yang paling tepat dalam mengembangkan sektor pariwisata.

3.2 Alur Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Paradiplomasi

Pemerintah Kota Semarang memiliki peraturan mengenai kerjasama luar negeri yang dirumuskan melalui Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018 mengenai kerjasama daerah. Kerjasama daerah tersebut dilaksanakan oleh Dinas Otonomi Daerah yang membawahi Subbagian Kerjasama Antarlembaga. Munculnya peraturan pemerintah tersebut sebagai wujud sistem otonomi daerah atau desentralisasi yang digunakan Indonesia dalam mengelola pemerintahan. Pemerintah Indonesia juga memiliki seperangkat aturan untuk mengatur kemungkinan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak asing, meskipun belum dalam bentuk aturan hukum yang kokoh karena bukan berbentuk Undang-Undang, namun masih dalam bentuk peraturan menteri dalam negeri, yakni Permendagri No 1 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri di jajaran Kementerian Dalam Negeri.

Dalam menjalankan aktivitas paradiplomasi, terdapat berbagai prosedur yang harus dilakukan pemerintah daerah sebagai upaya koordinasi dengan pemerintah pusat di bawah Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi tersebut lebih lanjut berupa pendanaan kegiatan paradiplomasi atau *sister city* pemerintah daerah yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri. Mekanisme tersebut yaitu:

1. Identifikasi Potensi dan Permasalahan

Identifikasi permasalahan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memperoleh sponsor dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dinilai sangat mengenal potensi daerahnya beserta permasalahan yang dihadapi sehingga, analisis mengenai permasalahan daerahnya sangat penting sebagai basis pemecahan masalah atau solusi yang akan dilakukan menggunakan dana hasil alokasi pemerintah pusat (APBD). Identifikasi potensi dan permasalahan harus dikaji secara komprehensif untuk memudahkan analisis penyelesaian beserta dana yang dibutuhkan. Identifikasi juga memuat urgensi pentingnya program yang selanjutnya dapat diselesaikan melalui *sister city* dengan negara lain.

2. Penyusunan Dana Alokasi APBD

Setelah melakukan identifikasi detail mengenai potensi beserta permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah maka, selanjutnya dilakukan seleksi dana. Akan dilakukan identifikasi dan penyortiran apakah proyek paradiplomasi tersebut layak didanai menggunakan dana APBD atau tidak. Kriteria pendanaan bergantung pada urgensi permasalahan. Penyerapan dana juga tidak hanya bersumber dari APBN semata namun dari investasi pihak ketiga seperti perusahaan multinasional (MNC), organisasi internasional non-pemerintah (INGO), dan lain lain.

3. Audiensi dengan Pemerintah Pusat

APBD dialirkan dari ABPN yang disusun oleh pemerintah pusat. APBD disusun oleh badan legislatif yang diwakili oleh DPD. DPD akan melakukan audiensi dengan pemerintah pusat mengenai kebutuhan pemerintah daerah sehingga pemerintah pusat dapat mempertimbangkan permasalahan tersebut.

4. Seleksi Proposal oleh Kementerian Dalam Negeri

Apabila proposal atau permohonan pemerintah daerah telah lolos tahap pengalokasian APBD maka akan difinalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri selaku sponsor pemerintah daerah dalam melaksanakan paradiplomasi. Kebijakan tersebut berisi keputusan apakah kementerian dalam negeri menyetujui untuk memberikan sponsor atas kegiatan paradiplomasi yang dilakukan. Apabila proposal proyek paradiplomasi sesuai dengan visi dan misi daerah tersebut maka akan dilakukan

penyetujuan oleh pemerintah pusat (Bappeda, 2018). Selanjutnya juga akan ditentukan pihak-pihak yang terlibat dan berkaitan dalam paradiplomasi daerah tersebut oleh kementerian dalam negeri bersama kementerian luar negeri (Bappeda, 2018). Pemerintah pusat akan membantu menentukan dan menghubungkan *stakeholder* paradiplomasi pemerintah daerah yang dapat berupa perusahaan multinasional, organisasi internasional, maupun perusahaan swasta.

3.3 Pentingnya Pemerintah Pusat dalam Efektivitas Paradiplomasi

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam proses paradiplomasi, terutama dalam pelaksanaan program *sister city* tentunya dikarenakan beberapa sebab, salah satunya adalah kurang dilibatkannya Pemerintah Pusat dalam prosesnya karena adanya desentralisasi dan otonomi daerah yang menyebabkan Kota Semarang berhak untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Namun demikian, dalam perkembangannya, Kota Semarang mulai melibatkan Pemerintah Pusat dalam program *sister city*. Dalam kerjasamanya dengan Danida mengenai pengelolaan sampah di TPA Jatibarang, kerjasama teknologi tersebut dapat terjadi dengan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) (Bappeda Kota Semarang, 2018). Selain itu, kerjasama dengan Kota Toyama juga berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kedua kerjasama tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang konkrit bagi Kota Semarang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sangatlah berpengaruh dalam proses paradiplomasi Kota Semarang. Pemerintah Pusat memiliki kemampuan dan *network* yang lebih besar dalam mencari kesempatan kerjasama untuk Kota Semarang sehingga hasil yang didapatkan lebih optimal. Selain itu, dengan menggandeng Pemerintah Pusat, Kota Semarang dapat mendapatkan bantuan berupa dana APBD untuk membiayai program-program dan kegiatan. Program-program dan kegiatan tersebut jika lolos seleksi oleh Kementerian di tingkat pusat kemudian akan mendapatkan bantuan dari Lembaga Asing melalui Kementerian. Dengan demikian, proses kerjasama menjadi lebih terstruktur dan efektif.

Sebagai salah satu upaya untuk menghindari *silent diplomacy* dan diplomasi searah, Pemerintah Pusat perlu dilibatkan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dapat membantu Kota Semarang untuk melakukan promosi dan *sounding* ke luar sehingga diplomasi

yang terjadi tidaklah hanya satu arah. Kemenlu dapat melibatkan Kota Semarang dalam kunjungan-kunjungan yang dilakukan ke kota-kota di luar negeri sehingga kerjasama dapat terus terjadi. Dengan melibatkan Pemerintah Pusat, keberhasilan paradiplomasi atau *sister city* yang dihasilkan tentunya akan lebih optimal, sehingga tidak akan terdapat *sleeping MoU*. Sebagai salah satu contohnya adalah ketidakberhasilan Kota Semarang dalam melakukan kerjasama *sister city* dengan Kota Beihai. Kota Semarang kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Kota Beihai karena tidak terdapat perkembangan yang berarti di hubungan kedua kota tersebut. Kota Semarang juga ingin mengurangi hal-hal yang berpotensi untuk menghasilkan apa yang dapat dikatakan sebagai *so-called silent diplomacy*.

Di samping itu, Pemerintah Pusat memiliki tujuan yang sama dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara lain sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sejatinya saling memberikan keuntungan untuk satu sama lain. Sebagai satu kesatuan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat saling berkoordinasi sehingga dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan optimal.

3.4 Lokalitas Kota Semarang sebagai Modalitas Paradiplomasi di Level Global

Konsep lokalitas lekat kaitannya dengan tempat atau wilayah yang memiliki karakteristik tersendiri. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa lokalitas perlu memiliki unsur atau komponen yang dapat diidentifikasi. Dalam konteks ini, lokalitas Kota Semarang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur pembentuk karakter sebagai identifikasi yang membedakannya dengan wilayah lain, yang merupakan interaksi dinamis antara unsur statis berupa geografis setempat, yang kemudian memberikan pengaruh pada unsur-unsur dinamisnya seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik.

Kota Semarang yang secara geografis terletak di pesisir utara Pulau Jawa merupakan pintu perdagangan sehingga secara historis memiliki posisi penting dalam perkembangan budaya lokal. Interaksi antara kelompok pendatang dan penduduk asli menjadikan Kota Semarang sebagai melting pot budaya Jawa, Arab, Cina, dan Belanda. Jejak akulturasi dan asimilasi budaya tersebut masih dapat ditemukan di Kota Semarang, misalnya dalam bentuk arsitektur, seni batik, hingga kuliner.

Eksistensi kelompok diaspora yang berbaur dengan penduduk asli juga menjadi bukti posisi Kota Semarang sebagai melting pot dari berbagai budaya semenjak berdiri 500 tahun

yang lalu hingga di era globalisasi masa kini. Komunitas diaspora di wilayah Kota Semarang didominasi oleh mereka yang disebut sebagai “peranakan” (keturunan etnis Cina) menjadi refleksi nyata dari interaksi multi etnis yang telah berjalan sepanjang sejarah perkembangan kota.

Akulturasinya antara budaya Cina dan Jawa menjadi pengaruh dominan dalam pembentukan karakter budaya Semarang, yang terefleksikan dalam budaya kuliner seperti loempia (lumpia), kue moci, wingko babad, hingga lontong cap go meh. Dalam kesenian daerah, akulturasi antara budaya Jawa dan Cina (juga budaya Arab) juga dapat dilihat dari pertunjukan seni “Warak Ngendhog” yang merupakan makhluk fiktif berupa binatang berkepala singa (sebagai representasi etnis Cina), berleher panjang (Arab), serta bertubuh kambing (Jawa) yang diarak mengelilingi kota menjelang bulan Ramadhan. Dalam bidang arsitektur, komunitas peranakan yang mulanya bermukim di daerah Simongan, pada tahun 1741 direlokasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Gang Baru yang sekarang berada di kawasan Kota Lama (Pikiran Rakyat, 2016). Dari perpindahan permukiman tersebut, terdapat peninggalan arsitektur berupa Kuil Sam Poo Kong serta arsitektur bangunan bergaya Oriental di kawasan Gang Baru yang kini juga dikenal dengan nama Kampung Pecinan. Aktivitas di kawasan Pecinan ini masih mempertahankan nilai-nilai budaya Peranakan, sehingga menjadi atraksi wisata tersendiri bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman belanja dan kuliner tradisional Cina.

Selain Etnis Cina, Kota Semarang sebagai melting pot juga mempertemukan budaya Barat yang dibawa oleh pendudukan kolonial Belanda dengan budaya lokal. Meskipun demikian, jejak interaksi antar kedua budaya tersebut lebih bersifat asimilasi dibandingkan akulturasi. Hal ini dapat ditelusuri jejaknya dari segregasi antar ras yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial antara bangsa kulit putih, pribumi, dan bangsa lainnya (termasuk di dalamnya Etnis Cina dan Arab), yang diciptakan dalam stratifikasi sosial masyarakat untuk membatasi interaksi antar kelompok. Pembatasan itu sendiri dimaksudkan untuk menjaga kemurnian budaya kolonial yang pada masa itu berfungsi sebagai instrumen hegemoni. Fungsi yang demikian dapat dilihat dari digunakannya gaya-gaya arsitektur Belanda dalam bangunan-bangunan simbol kekuasaan mulai dari rumah pejabat kolonial, gedung pemerintahan hingga gereja. Tidak adanya pembauran budaya di level akar rumput menjadikan kedua budaya tidak mengalami akulturasi, sehingga ketika pendudukan kolonial berakhir, tidak ada nilai-nilai budaya Barat yang tertinggal dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang.

Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa asimilasi dan akulturasi yang hanya mungkin terjadi karena faktor geografis tersebut telah membentuk ciri budaya lokal yang membedakannya, termasuk dengan wilayah sekitar yang nantinya dikenal sebagai *hinterland* Kota Semarang. Proses budaya yang terjadi telah mempengaruhi *tangible* maupun *intangible culture* yang berkembang, yang nantinya mampu menjadi salah satu modalitas sosial-budaya dalam paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain dalam konteks mempromosikan Kota Semarang di level global. Modalitas sosial-budaya yang merupakan nilai-nilai budaya ini nantinya mampu menjadi kemasan romantisme atas modalitas ekonomi, yang merefleksikan nilai-nilai komersial.

Pembangunan di Kota Semarang yang lebih banyak difokuskan pada pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan industri merupakan pilihan yang logis jika ditimbang dari aspek historis serta karakter geografis. Dari aspek historis, sebagai kota yang tumbuh dan berkembang sebagai kota pelabuhan sejak era kerajaan Hindu- Buddha dan semakin ditegaskan fungsinya di era pendudukan Pemerintah Kolonial Belanda, Kota Semarang lebih banyak mengembangkan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi berbasis jasa dengan rancangan tata ruang kota yang juga dibuat berdasarkan tujuan tersebut. Dengan jadi pusat perdagangan dan pemerintahan bagi wilayah Jawa Tengah, Kota Semarang hanya memiliki jumlah lahan yang terbatas di daerah rural untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian guna menunjang kehidupan di wilayah kota. Dalam perkembangannya, fungsi penunjang yang dimiliki oleh wilayah rural tersebut didorong lebih jauh beberapa wilayah sekitar seperti Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Salatiga, dan Kabupaten Grobogan (Kedungsepur) sebagai *hinterland* dari Kota Semarang (Pemerintah Kota Semarang, 2014, 2), sementara wilayahnya sendiri lebih banyak yang difungsikan sebagai pusat administrasi dan bisnis.

Dengan labelnya sebagai kota investasi dan perdagangan, lahan yang ada di Kota Semarang lebih banyak diperuntukkan sebagai kawasan industri seperti Taman Industri BSB, Kawasan Industri Candi, *BSB Bonded Zone*, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma (Seputar Semarang, n.d.), Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, dan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru. Tingginya arus investasi yang masuk ke Kota Semarang dalam dekade terakhir membuat kawasan industri dengan luas total 1.029 ha ini sudah penuh (Lazuardi, 2014) sehingga dalam pembuatan

kebijakan pembangunan, Pemerintah Kota mulai mendorong pembangunan kawasan industri di wilayah *hinterland* sekitarnya.

Banyaknya kawasan industri yang telah berkembang di Kota Semarang ini kemudian menjadi modalitas tersendiri karena telah tersedianya suprastruktur dan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi yang meliputi investasi, produksi, distribusi, dan konsumsi yang memadai. Terintegrasinya aktifitas ekonomi dari hulu ke hilir ini selanjutnya menjadi modal penting bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan paradiplomasinya, yang kemudian dikemas dalam paket kebijakan pembangunan berbasis *Meetings, Incentives, Conferences, and Events (MICE)* yang dikemas dengan romantisme budaya yang dimiliki sebagai bentuk modalitas sosial-budaya Kota Semarang.

3.5 Kebijakan Pembangunan Ekonomi Berbasis Lokalitas dalam *Meetings, Incentives, Conferences, and Events (MICE)*

MICE, atau juga dikenal sebagai *business event*, merupakan salah satu jenis pariwisata yang memadukan antara keperluan bisnis dan wisata untuk kesenangan. Secara keseluruhan, MICE dapat memberikan keuntungan yang lebih besar daripada wisata untuk kesenangan. Pertama, pengeluaran rata-rata per orang untuk aktifitas MICE lebih tinggi daripada pengeluaran wisata untuk kesenangan. Kedua, sebagian besar pengeluaran tersebut lebih banyak terserap untuk biaya komoditas pertemuan seperti sewa tempat dan biaya organisasi, yang berarti bahwa kemungkinan memperoleh keuntungan dari *added value* lebih tinggi daripada jika sebagian besar hanya digunakan untuk transportasi dan makanan. Ketiga, industri wisata berbasis MICE tidak mengenal musim sehingga keuntungan dapat dioptimalkan sepanjang tahun (Thailand Convention and Exhibition Bureau, 2015).

MICE sendiri menjadi pilihan yang rasional bagi Kota Semarang setidaknya karena dua faktor. Pertama, kehidupan ekonomi Kota Semarang lebih banyak didominasi oleh aktifitas bisnis perdagangan. Kota Semarang memiliki delapan kawasan industri aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Banyaknya perusahaan di Semarang tentunya juga berimplikasi pada kuantitas acara bisnis yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Kedua, pusat atraksi dari aktifitas MICE adalah acara bisnis yang diselenggarakan, dengan wisata kesenangan sebagai nilai tambah dari paket yang ditawarkan. Dengan fokus yang lebih banyak tertuju pada keikutsertaan di dalam acara bisnis, dapat mengkompensasi minimnya destinasi pariwisata

unggulan yang belum dikelola dengan baik. Sementara menjual keunggulan komparatif di sisi pelayanan penyelenggaraan acara bisnis, pemasukan yang diperoleh serta investasi yang masuk dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi objek-objek wisata unggulan Kota Semarang.

Sebagai bentuk realisasi dari arah kebijakan ini, pada tahun 2007 pemerintah Kota Semarang di bawah Walikota Sukawi Sutarip mencanangkan program “Semarang Pesona Asia (SPA)” yang bertujuan untuk memperkenalkan dan membangun citra kota baik di level nasional maupun internasional guna mendorong pembangunan ekonomi dan pariwisata lokal. Program ini memiliki tiga kegiatan pokok, yaitu kepariwisataan, forum bisnis pengusaha, serta festival atau pameran. (Kementerian Sekretariat Negara, 2007)

Kegiatan kepariwisataan dilakukan dengan melakukan revitalisasi terhadap objek-objek wisata yang mengangkat budaya lokal, misalnya seperti Kelenteng Sam Poo Kong, Kawasan Gang Baru, Kawasan Kota Lama, Gedung Lawang Sewu, hingga Masjid Agung Jawa Tengah. Selain revitalisasi, pemerintah juga berupaya menghidupkan kesenian lokal melalui festival yang diadakan, dua di antaranya adalah festival Masjid Agung Jawa Tengah dan festival Sam Poo Kong (Kementerian Sekretariat Negara, 2007). Dengan menggerakkan kehidupan ekonomi-pariwisata lokal, selanjutnya pemerintah menegaskan misi dibentuknya program SPA dengan diadakannya forum bisnis pengusaha yang bertujuan untuk mempromosikan Kota Semarang (dan sekitarnya) kepada investor melalui acara tahunan yang dinamakan sebagai *Semarang Business Forum* (Sem’Biz).

Setelah terjadi pergantian rezim kepemimpinan, kegiatan dari program SPA yang masih dipertahankan adalah Sem’Biz. Acara tahunan yang kini berada di bawah koordinasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang ini memiliki tujuan khusus guna mempromosikan potensi dan peluang investasi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing Kota Semarang demi tercapainya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya, Sem’Biz tidak hanya menjadi forum promosi investasi di Kota Semarang saja tetapi juga mengajak kawasan *hinterland* yang dikenal dengan sebutan Kedungsepur (Pemerintah Kota Semarang, 2014).

Inklusi wilayah Kedungsepur dalam forum Sem’Biz dilatarbelakangi setidaknya oleh dua alasan. Pertama, wilayah hub tidak akan berkembang tanpa ada wilayah yang menjadi *spoke*, demikian juga sebaliknya. Pemahaman akan posisi strategis Kota Semarang sebagai pengungkit investasi di *region* terefleksikan dalam visi Sem’Biz, yaitu menjadikan kota tersebut sebagai

trendmark investment policy di Jawa Tengah (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Kedua, daya tarik bagi investor untuk bergabung dalam forum ini juga akan lebih tinggi jika yang ditawarkan tidak hanya kesempatan berinvestasi di Kota Semarang saja, melainkan kawasan *Greater Semarang* yang telah terintegrasi dengan baik, minimal dari sisi infrastruktur penunjang industri.

Terlepas dari kesulitan yang dialami oleh pemerintah Kota Semarang dalam membangun destinasi wisata historis, Sem'Biz dapat dikatakan berhasil mendatangkan investasi dalam kerangka pembangunan industri MICE. Selain sektor properti historis, Pemerintah Kota Semarang secara agresif membuka peluang investasi properti dalam bentuk hotel, hunian, maupun kawasan perkantoran terpadu. Sebagai contoh, dalam Sem'Biz tahun 2014, investasi yang terkumpul untuk bidang properti tersebut nilainya mencapai Rp 2,93 triliun, lebih dari setengah dari total investasi yang diterima Kota Semarang yaitu sebesar Rp 4,907 triliun (Pemerintah Kota Semarang, 2014). Dari sisi ini, dapat dilihat bahwa Sem'Biz sebagai salah satu forum bisnis investasi tidak lepas dari ide besar arah pengembangan perekonomian Kota Semarang, yaitu sebagai pusat industri, perdagangan, dan MICE yang unggul di level nasional maupun internasional.

Dari paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang telah memiliki modal dalam membangun paradiplomasi. Dua modal yang paling utama adalah sosial-budaya berupa identitas kultural sebagai kota *melting pot* yang mengalami akulturasi dan asimilasi dengan budaya pendatang. Di satu sisi, modal ini sendiri saja sudah dapat menjadi atraksi untuk pengembangan industri pariwisata berorientasi MICE yang memang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Di sisi lain, nilai-nilai historis dan budaya yang terendogensiasi dalam *tangible* maupun *intangible culture* mampu menjadi romantisme yang mampu menumbuhkan sentimen dari aktor-aktor parner paradiplomasi karena adanya ikatan kultur dalam konteks diaspora maupun keselarasan pemahaman akan nilai-nilai universal yang perlu dipertahankan.

Unsur kedua berupa modalitas ekonomi berkenaan dengan potensi potensi lokal baik berupa sumber daya alam maupun non-sumber daya alam yang bernilai ekonomis sebagai bagian dari *trade-off* negosiasi paradiplomasi yang dilakukan. Di satu sisi, pemerintah Kota Semarang dan sekitarnya membutuhkan investasi yang nyatanya hanya dapat diperoleh dari luar wilayah mereka. Dengan adanya globalisasi yang membuka peluang terjalannya kontak langsung dengan aktor-aktor negara maupun sub-negara di belahan dunia lain dapat menjadi

alternatif sumber investasi, bahkan dengan kekuatan kapital yang lebih besar daripada hanya mengandalkan akumulasi kapital dalam negeri. Di sisi yang lain, partner potensial ini harus mendapat jaminan bahwa potensi lokal yang ditawarkan juga memiliki prospek profitabilitas yang sesuai dengan resiko investasi.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Semarang merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di Jawa Tengah. Sebagai ibu kota provinsi, Semarang menawarkan banyak hal dalam berbagai aspek. Salah satu hal yang paling menonjol dari Semarang adalah lokalitas yang dimiliki. Seperti telah disinggung sebelumnya, lokalitas merupakan salah satu langkah paling tepat dalam memajukan kota. Globalisasi yang melenyapkan sekat-sekat pemisah antara negara dan kota membuat ciri khas lokal terancam, namun tidak bagi lokalitas Semarang.

Kearifan lokal Semarang yang tergambar dari berbagai nilai budaya melalui festival lokal menunjukkan potensi dari lokalitas Semarang yang mampu membawa Semarang maju sejauh ini. Pemerintah Kota Semarang sebagai *stake holder* utama terbilang jeli dalam menangkap dan memaksimalkan potensi lokalitas yang ada. Berbagai jenis festival kebudayaan dan upaya penajaman lokalitas telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang. Beberapa upaya yang paling menonjol antara lain pencanangan Sem Biz dan Semarang Pesona Asia yang diimplementasikan pada periode kepemimpinan Wali Kota Sukawati. Kedua hal tersebut menjadi tonggak bangkitnya lokalitas kota Semarang dalam menantang arus globalisasi dan bertahan dalam terpaan modernisasi. Semarang berhasil tampil sebagai kota yang sukses mempertahankan lokalitas sebagai cara utama dalam memajukan kota.

Dari penelitian yang dilakukan, ternyata Kota Semarang secara khusus wilayah Kota Lama memiliki banyak potensi yang bernilai ekonomi khususnya di bidang pariwisata. Namun, penelitian ini melihat masih kurangnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi dan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada di Kota Lama sehingga potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Tidak hanya itu, dengan dilakukannya banyak revitalisasi di wilayah Kota Lama, diperlukan suatu konsep yang dapat digunakan tidak hanya untuk meningkatkan sector pariwisata di wilayah Kota Lama, tetapi juga dapat digunakan pemerintah daerah untuk mencapai *Sustainable Development*. Penelitian ini menyarankan penggunaan konsep *ecotourism* yang mana *ecotourism* merupakan cara yang paling benar dan efektif untuk menghasilkan keuntungan sekaligus mengelola dan melindungi destinasi wisata. Dengan demikian ekoturisme merupakan strategi investasi jangka panjang untuk keberlangsungan destinasi wisata tersebut.

Kedua, kegiatan ekoturisme memungkinkan masyarakat sekitar untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kawasan destinasi wisata. Di lain sisi, kontribusi dari masyarakat di sekitar kawasan Kota Lama Semarang akan sangat berdampak dalam suksesnya implementasi dari konsep *ecotourism* itu sendiri. Masyarakat di sekitar kawasan Kota Lama Semarang harus memiliki *sense of belonging* dengan wilayah tersebut dan memiliki keinginan untuk turut andil dalam melakukan dan menyukseskan pembangunan di Kota Lama. Sehingga dibutuhkan kolaborasi secara nyata baik dari pemerintah dalam melakukan revitalisasi dan memberikan fasilitas fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang Kota Lama sebagai wilayah pariwisata, dan juga dari masyarakat yang tinggal di wilayah Kota Lama untuk dapat memanfaatkan hasil dari revitalisasi dan membantu pemerintah dalam meningkatkan sector pariwisata dari Kota Lama.

Diplomasi lokal memberikan dimensi baru dalam mengakomodir kebutuhan akan aktualisasi lokalitas. Lokalitas dan *Paradiplomacy* merupakan satu kesatuan yang memberikan jalan bagi majunya pembangunan Kota Semarang. *Paradiplomacy* menyediakan ruang dan jalan bagi pemerintah lokal untuk menginisiasi dan melaksanakan diplomasi melintasi batas globalisasi. Diplomasi konvensional yang harus melibatkan pemerintah pusat tidak lagi menjadi keharusan, mengingat daerah yang paling memahami potensi dari lokalitas mereka sendiri. *Paradiplomacy* juga memberikan alternatif bagi daerah dalam membangun wilayah masing-masing. Usaha untuk menjalin kemitraan *sister city* menjadi salah satu contoh baik bagaimana daerah diberikan kebebasan untuk memaksimalkan lokalitas masing-masing dan menggunakannya sebagai sarana memajukan potensi daerah.

Kerjasama yang dilakukan oleh Kota Semarang sejauh ini nampak membuahkan hasil positif. Kota Semarang tampil sebagai kota yang mengemuka dalam kaitannya dengan kondisi regional Jawa Tengah. Status Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah membuat setiap langkah strategis Kota Semarang menjadi cerminan bagi kemajuan Provinsi Jawa Tengah pula. Dengan demikian, kemajuan Kota Semarang menjadi nilai plus bagi pembangunan dan pengembangan lokalitas Jawa Tengah. Bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti Jawa Tengah mampu tampil mengemuka dalam melanjutkan apa yang sudah diinisiasi oleh Kota Semarang. Oleh karena itu, keberhasilan Kota Semarang dalam memajukan lokalitasnya menjadi inspirasi bagi terbukanya kesempatan bagi inisiasi lokalitas Jawa Tengah.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Semarang
 - a. Pemerintah Kota Semarang seyogyanya merawat dan memastikan keberlanjutan dari penggalian nilai-nilai lokalitas Semarang.
 - b. Pemerintah Kota Semarang seyogyanya berkoordinasi lebih baik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar penggalian nilai-nilai lokalitas Semarang dapat berjalan secara koheren dan sinergis.
2. Bagi penelitian selanjutnya
 - a. Penelitian ini masih terbatas pada bagaimana proses Kota Semarang menginisiasi lokalitas setempat melalui Paradiplomacy. Selayaknya penelitian berikutnya mampu menganalisis bagaimana proses implementasi berjalan.
 - b. Penelitian ini masih terbatas pada ruang lingkup periode kepemimpinan di masa lampau. Akan lebih baik jika penelitian selanjutnya dapat menawarkan pandangan bagaimana periode sekarang melanjutkan usaha menggali lokalitas Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Anidu dkk, 2014: "*Implementasi Kerjasama Sister Schools Sma Negeri 3 Malang-River Valley High School Dalam Perspektif Diplomasi Publik*, dalam http://journalarticle.ukm.my/8462/1/Anidu_Alamsyah,_Imam_Hanafi_and_Mangku_Purnomo_41_%281%29_July_2014.pdf.
- A. Epstein. Richard, 2013: "*Direct Democracy: GOVERNMENT OF THE PEOPLE, BY THE PEOPLE, AND FOR THE PEOPLE?*" dalam *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 34. http://www.harvard-jlpp.com/wp-content/uploads/2013/10/34_3_819_Epstein.pdf
- A. Garner, Bryan (ed), 1999: *Black's Law Dictionary seventh Edition*, St. Paul Minn, New York.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. n.d. *Banyaknya Angkatan Kerja di Kota Semarang 2012-2015*. Diakses 23 Oktober 2019. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/6>.
- _____. *Jumlah Pekerja di Kota Semarang 2012-2014*. Diakses 23 Oktober 2019. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/8>.
- _____. *Luas Penggunaan Lahan Kota Semarang 2012-2015*. Diakses 21 Oktober 2019. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/26>.
- _____. *Realisasi Volume Ekspor Non Migas Menurut Sektor*. Diakses 22 Oktober 2019. <https://semarangkota.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/27>.
- Barston, R. P, 2006: "The Changing Nature of Diplomacy" dalam *Modern Diplomacy*. New York: Pearson Education.
- Biro Kerjasama Setda Propinsi DIY, 2006: "Bunga Rampai: Kerjasama Luar Negeri".
- Conyers, D, 1984: "Decentralization and Development: a Review of the Literature", *Public Administration and Development*, Vol. 4.
- Ekins, Richard, 2009: "*A Government for the People: The value of representative*" dalam http://www.maxim.org.nz/site/DefaultSite/filesystem/documents/GP_Richard_Ekins_oct_09.pdf.

- Fathun, L. M., 2016: Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. *Indonesian Perspective*, 1(1), pp. 75-94.
- Hadi, Umar., 2007: “*Diplomasi Publik Menjembatani Persepsi Domestik dan Internasional*”, Tabloid Diplomasi Edisi Desember 2007.
<http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/55-desember-2007/535-diplomasi-publik-menjembatani-persepsi-domestik-dan-internasional.html>.
 Diakses pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019.
- Held, D., dkk, 1999: *Global Transformations: Politics, Economics, and Culture*. Stanford: Stanford University Press.
- Hermi S., 2013: “Prasyarat Keberhasilan Kerja Sama Sister Province: Studi Kasus Sister Province Antara Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian-Cina”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial Undip*, Vol. 13, No. 2.
- Hidayat, Syarif., 2008: “Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif *State- Society Relation*” dalam *Jurnal POELITIK Vol.1 No.1*.
- Kementerian Sekretariat Negara, 2007: *Semarang Pesona Asia 2007 Resmi Dibuka*. Diakses pada 20 Oktober 2019
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=667.
- Kuznetsov, A. S., 2015: *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge.
- Lazuardi, H., 2014: *Kawasan Industri Kota Semarang Hampir Penuh*. Diakses pada 29 Oktober 2019
<http://kabar24.bisnis.com/read/20140508/78/226142/kawasan-industri-kota-semarang-hampir-penuh>.
- Lecours, A., 2008: *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, Den Haag: Netherlands Institute of International Relations ‘Clingendael’.
- Mathews, J. T., 1997: “Power Shift” dalam *Foreign Affairs Vol. 76, No. 1*
- Pemerintah Kota Semarang. *Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Semarang*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- _____. *Profil Kabupaten/Kota*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.

- _____. 2012: *Selayang Pandang Kota Semarang tahun 2012*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- _____. 2013: *LKPJ Walikota Semarang Tahun Anggaran 2013*. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- _____. 2014. *Laporan Kegiatan: 8th Semarang Business Forum*, Semarang: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 01/B/RO/IV/2015/01 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Luar Negeri, http://www.kemlu.go.id/Documents/RENSTRA_PK_LKJ/RENSTRA_KEMENLU%020152019_FINAL_DONE_SK%20MENLU_pdf_version.pdf.
- Kuznetsov, A. S., 2015: *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. New York: Routledge.
- Lazuardi, H., 2014: *Kawasan Industri Kota Semarang Hampir Penuh*. Diakses pada 29 Oktober 2019. <http://kabar24.bisnis.com/read/20140508/78/226142/kawasan-industri-kota-semarang-hampir-penuh>.
- Lecours, A., 2008: *Political Issues of Paradiplomacy: Lessons from the Developed World*, Den Haag: Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.
- Mawhood P. (ed), 1987: "*Local Government in The Third World: The Experience of Tropical Africa*", Chicheser: John Wiley & Sons.
- Mukti, Yandu Setiya, 2013: "*Keberhasilan Kerjasama Sister Province Jawa Timur Dengan Gyeongsangnam-Do Korea Selatan Tahun 2006-2012*", dalam <http://repository.upnyk.ac.id/5735/>
- Niluh Wayan, Budiari, 2013: "*Faktor Pendorong Keberhasilan Kerjasama Sister Province Antara Pemerintah Jawa Timur Dengan Australia Barat (2007-2012)*", <http://eprints.upnyk.ac.id/3267/>
- Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis & G. Shabbir Cheema, 1983: "*Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*", Washington D.C.: The World Bank.

- Kementerian Sekretariat Negara, 2007: *Semarang Pesona Asia 2007 Resmi Dibuka*.
Diakses pada 30 Oktober 2019
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=667
- Pemerintah Kota Semarang, 2014: *Laporan Kegiatan: 8th Semarang Business Forum*,
Semarang: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Pemerintah Kota Semarang, n.d. *Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Semarang*,
Semarang: Pemerintah Kota Semarang.
- Pikiran Rakyat, 2016: *Spirit Akulturasi Tiongkok-Jawa Hasilkan Budaya Peranakan*.
Diakses pada 29 Oktober 2019, <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/08/01/spirit-akulturasi-tiongkok-jawa-hasilkan-budaya-peranakan-376233>.
- Roy, S. L, 1993: *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali.
- Ruland, J., 1993: “*Urban Development in Southeast Asia: Regional Cities and Local Government*”, Boulder: Westview Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

BIODATA KETUA PENELITIAN

I. Identitas Diri

1. Nama Lengkap (dengan Gelar) : Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M. Si
2. Jabatan Fungsional : Lektor
3. NIP : 19630422.198903.2.001
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Temanggung, 22 April 1963
5. Alamat Rumah : Jl. Tlogosari I No. 44 A RT 01/RW 01
Bulusan
Tembalang Semarang Telp./Faks.
: 024 76482700
6. No. HP : 08156641333
7. Alamat Kantor : Jl. Prof. H. Soedarto, SH No. 13 Kampus
Undip Tembalang Semarang
8. Telp./Faks : 024 7465407 /024 7465405
9. Alamat e-mail : herminis@undip.ac.id atau
herminisq@yahoo.com
10. Mata Kuliah yang diampu : 1. Pengantar Ilmu Politik
2. Teori Politik
3. Lembaga dan Proses Politik Indonesia
4. Kebijakan Publik
5. Azas-Azas Manajemen
6. Pancasila
7. Manajemen Program Pembangunan

II. Riwayat Pendidikan

Program Nama Perguruan TinggiBidang Ilmu	S1 UNDIP Ilmu Pemerintahan	S2 UGM Ilmu Politik	S3 - -
Tahun Masuk Tahun Lulus	1982 1988	1991 1995	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengaruh Tingkat Sosial Ekonomi Petani Terhadap Tingkat Partisipasi Politik di Kabupaten Temanggung	Proses dan Prospek Integrasi WNI Keturunan Cina di Singkawang	
Nama Pembimbing/Promotor	I. Drs. Hartono II. Drs. A. Hamid Widodo III. Dra. Endang HOK, SU	I. Prof. Yahya II. Prof. Ichlasul Amal III. DR. Budi Winarno	

III. Pengalaman Penelitian (5 tahun terakhir)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
	2015	Pemilukada Dalam Pandangan Politik Wong Cilik Kota Semarang	Ketua	DIPA FISIP Undip
	2014	Analisis Keterpilihan Denty Dalam Pemilu DPD RI 2014	Ketua	DIPA FISIP Undip
	2013	Implementasi Kebijakan Kerjasama Luac Negeri di Provinsi Jateng: Studi Kasus <i>Sister Province</i> Antara Jawa Tengah dengan Provinsi Fujian-Cina	Ketua	BNOPTN
	2012	Analisis Perbandingan Peran Politik Senat AS dengan DPD Indonesia	Ketua	DIPA FISIP Undip
	2011	Evaluasi Pencapaian Program MDGs Provinsi Jawa Tengah	Ketua	DIPA FISIP Undip
	2010	Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilukada Kota Semarang Tahun 2010	Anggota	DIPA FISIP Undip
	2010	Evaluasi dan Pengembangan Model MBS di Wilayah Perdesaan di Jawa Tengah	Anggota	Balitbang Propinsi Jawa Tengah
	2010	Implementasi UU NO. 14 Tahun 2008 Menuju Good Governance (Studi Kasus di Kabupaten Sragen dan Banjarnegara)	Anggota	Balitbang Propinsi Jawa Tengan

IV. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat (5 tahun terakhir)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Ketua/anggota Tim	Sumber Dana
	2015	"Pencegahan Praktek Kejahatan Ekonomi dalam Perdagangan	Ketua	DIPA FISIP Undip

		Bebas: Origin Fraud dalam Industri Kerajinan Mebel Kayu di Jepara"		
	2015	"Te mbakau Sebagai Identitas: Upaya Peningkatan Pengethun Petani Tembakau di Teanggung terhadap Fraud of Origin dalam Menghadapi Perdagangan Bebas"	Anggota	DIPA FISIP Undip
	2014	Meningkatkan Pengetahuan Peserta Didik Dari Kalangan Masyarakat Bawah". Di Kelurahan Meteseh Kota Semarang	Anggota	DIPA FISIP Undip
	2014	HI Mengajar : Upaya Peningkatan Taraf Pendidikan Kepemimpinan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang	Anggota	DIPA FISIP Undip
	2013	Peningkatan Pengetahuan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Tentang Peraturan Bekerja di Luar Negeri Serta Budaya Negara -Negara Tujuan	Anggota	DIPA FISIP Undip
	2012	Pengabdian Kepada Masyarakat; pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Koperasi Berbasis Komputer Bagi Pengurus dan Anggota Koperasi Curug Mandiri Di Desa Curug Sewu Kecamatan Patehan Kabupaten Kendal	Anggota	DIPA FISIP Undip
	2012	Penguatan Kelembagaan Lokal Dalam Rangka Pengembangan Mangrove Education Center dan Mangrove Tourism Center di Kawasan Tapak Kelurahan Tugurejo Kecamatan Tugu Kota Semarang"	Anggota	DIPA FISIP Undip
	2011	Pendampingan Pelaksanaan Administrasi Pembukuan Koperasi Serba Usaha Curug Mandiri di Desa Curug Sewu Kecamatan	Anggota	DIPA FISIP Undip

		Patehan Kabupaten Kendal		
	2011	Fasilitasi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagai Upaya Efektifitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Meteseh Kec. Tembalang Kota Semarang	Anggota	DIPA FISIP Undip

V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal (5 tahun terakhir)

o.	Tahun	Judul Penelitian	Penerbit/Jurnal
	2014	Prasyarat Keberhasilan Kerjasama Sister Province	Jurnal Ilmu Sosial Undip, Vol. 13 No. 2 Agustus 2014 ISSN: 1411 - 8254
	2014	Kearifan Lokal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung	Majalah Forum Undip, Vol. 41 No. 1 Juni 2014, ISSN 0126-0731
	2013	Pemilukada Miskin Figur	Suara Merdeka
	2009	Menakar Good Governance di Pemerintahan SBY – Boediono 2009 – 2014	Forum FISIP Universitas Diponegoro
	2009	Keterpurukan Pemilu DPD, 2009	Suara Merdeka

Biodata sebagai salah satu syarat dalam pengajuan usulan penelitian dan apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian, saya sanggup menerima sanksinya.

Semarang, 29 Oktober 2019

Ketua Tim Penelitian

Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si